



## PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) DALAM PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI KOTA JAYAPURA

Joseph A. L. Rahail<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pusat Studi Kependudukan, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Korespondensi: [josephrahail96@gmail.com](mailto:josephrahail96@gmail.com)

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 12/10/2023

Ditelaah: 21/10/2023

Diterbitkan: 30/11/2023

### KUTIPAN

Rahai, Joseph A. L. (2023). Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Jayapura.

*PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 62-71, doi: 10.47753/pjap.v4i2.68

### Abstrak

Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan masyarakat di tingkat kampung melalui program serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam pengembangan program, Kampung KB dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) sebagai akseptor KB aktif dan ketahanan keluarga sehingga dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam program Kampung KB melalui studi peran serta masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam program Kampung KB di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam dengan narasumber suami-istri PUS para stakeholder lokal dari unsur pemerintah kampung, tokoh adat, agama, perempuan dan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam program Kampung KB tergambar melalui keterlibatan mereka pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menerima manfaat. Faktor pengetahuan, sikap dan lingkungan sosial-budaya mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam program Kampung KB. Untuk itu dengan modal infrastruktur sosial masyarakat lokal berupa unsur tiga tungku (pemerintah kampung, adat dan agama) dan unsur dua peran (perempuan dan pemuda), dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kontekstual yang mengedepankan kualitas proses dari pada hanya input-output, sehingga menjadikan program kampung KB sebagai upaya inovasi yang memberikan perubahan bagi penerimaan konsep program untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat saat ini dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Peran Serta Masyarakat, Kampung KB

### Abstract

*Kampung Keluarga Berkualitas program is a government program to improve the quality of life of residents and communities at the village level through programs and development of other related sectors in order to create a small quality family. In the development of the program, KB Village is carried out through a family-based community empowerment approach to increase public awareness about population-based development, the participation of couples of childbearing age (PUS) as active family planning acceptors and family resilience so that it can have an impact on poverty alleviation. The purpose of this research is to examine community involvement in the KB Village program through a study of community*



*participation and the factors that influence it in the KB Village program in Jayapura City. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through group discussions and in-depth interviews with husband-wife PUS local stakeholders from the village government, traditional leaders, religious leaders, women and youth. The results showed that community participation in the KB Village program is reflected through their involvement in the decision-making, implementation and benefit receiving stages. The factors of knowledge, attitude and socio-cultural environment influence the community to be involved in the KB Village program. For this reason, with the social infrastructure capital of the local community in the form of three-stove elements (village government, adat and religion) and two-role elements (women and youth), a more comprehensive and contextual-based approach is needed that prioritizes the quality of the process rather than only input-output, thus making the KB village program an innovation effort that provides changes for the acceptance of the program concept to realize the current and sustainable quality of life of families and communities.*

**Keywords:** *public policy, management public, public service*

## **PENDAHULUAN**

Program KB sebagai kebijakan nasional dari pandangan berbagai tingkatan stakeholder dan masyarakat lokal di Provinsi Papua, dianggap tidak relevan dan tidak menjawab berbagai fenomena dan masalah kependudukan yang terjadi di Papua. Rumbiak (1999) menyatakan bahwa kebijakan program KB dengan pendekatan pembatasan jumlah anak dalam setiap keluarga lebih tepat diarahkan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk pada daerah-daerah yang padat penduduk, bukan seperti di Provinsi Papua yang jumlah penduduk sedikit. Fakta ini menyebabkan belum optimalnya pencapaian program KB di Provinsi Papua ditunjukkan tingginya angka TFR 2,76 (TFR nasional 2,18) menurut hasil *Long Form SP 2020*. Hal ini disebabkan karena rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi Wanita Usia Subur berusia 15-49 tahun hanya 14,6% (Yullyana, 2012). Alasan tidak menggunakan kontrasepsi (Riskesdas, 2013) karena kurangnya pengetahuan masyarakat (18,5%), dilarang suami (12%) dan alasan agama (9,8%).

Belum optimalnya akselerasi pembangunan terhadap perwujudan SDM yang berkualitas di Papua karena: 1) Kondisi obyektif geografis yang menyebabkan rendahnya aksesibilitas, padahal  $\pm$  80 persen penduduk Orang Asli Papua (OAP) bermukim di kampung-kampung pedalaman daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; 2) Pendekatan pembangunan yang hanya mendahulukan input-output dari pada kualitas proses dengan indikator kuantitatif tanpa mempertimbangkan kondisi obyektif sosial ekonomi-budaya yang membutuhkan dinamika proses yang berkualitas, sehingga telah menyebabkan masyarakat tidak diberdayakan dan masih tetap hidup miskin; dan 3) Situasi politik lokal yang sangat mempengaruhi berbagai kebijakan pembangunan bahkan penolakan terhadap beberapa program pembangunan karena dianggap tidak berpihak pada OAP, termasuk program Keluarga Berencana (Rumbiak, 1999; Sumule, 2003; Widjojo dan Tebay, 2014; dan Katharina, 2019).

Untuk itu kehadiran dan pengembangan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagai strategi inovatif pemerintah yang diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi berbagai hambatan penerimaan dan rendahnya peran serta masyarakat dalam program KB di Provinsi Papua. Pendekatan program Kampung KB ini sejalan dengan pendapat Rumbiak (1999) dan Widjojo dan Tebay (2014) yang menyatakan bahwa pengembangan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan di Papua perlu



mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif sosial-ekonomi-budaya dan geografis. Hal ini penting sebagai dasar menentukan langkah yang tepat sehingga membangun kepercayaan masyarakat lokal di Papua terhadap tujuan berbagai program pembangunan. Untuk itu, para pelaksana program harus memberi ruang dan peluang bagi pengembangan peran serta masyarakat untuk dapat menjadi pelaku dan penggerak, dimana sejak awal masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan namun menjadi subyek yang akan menjamin keberlanjutan pasca pendampingan program.

Pandangan tersebut dibuktikan melalui hasil penelitian Latu (2018) yang menyatakan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya melalui program KB sebagai upaya mengatasi permasalahan pengaturan kelahiran, maka pengembangan peran serta masyarakat dengan membangun komunikasi yang efektif merupakan salah satu pendekatan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektor secara berkelanjutan. Pentingnya peran serta masyarakat dalam ber-KB melalui program kampung KB juga dikemukakan Widodo (2020) menyatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan Desa Jambewangi menjadi percontohan Kampung KB tingkat nasional, selain karena adanya komitmen kuat dari para pemangku kebijakan pada semua tingkatan, optimalisasi fasilitas dan dukungan kemitraan, juga karena adanya peran serta masyarakat yang tinggi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Peran Serta Masyarakat (PSM)

Natoatmodjo (2003) dan Mikkelsen (1999) mengartikan peran serta masyarakat sebagai keterlibatan aktif dari seseorang atau dalam sekelompok orang (masyarakat) yang secara sadar berkontribusi secara sukarela dalam proses pembangunan dan terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan tahap evaluasi. Dalam keberhasilan pembangunan peran serta masyarakat menjadi salah satu aspek, bukan saja sebagai obyek namun juga menjadi subyek. Tahapan peran serta masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Nasdian, 2006) yaitu: tahap pengambilan keputusan; pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi. Turner dan Hulme (dalam Pasolong, 2011) menyatakan peran serta masyarakat dipengaruhi faktor internal: ketersediaan dan kualitas input yang digunakan dan faktor eksternal: semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung.

Plumer (dalam Slamet, 1994), Stanley (2006) dan Anggraeni, dkk. (2020) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat berpartisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kepercayaan terhadap budaya tertentu, sehingga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi partisipasi dan metodologi yang digunakan.

### 2. *Knowledge, Attitude dan Practice*

Suatu perilaku akan terbentuk mulai pada domain kognitif, artinya bahwa paham terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi sehingga memunculkan pemahaman yang baru tentang hal tersebut baru menimbulkan respon dalam bentuk domain sikap pada diri sendiri yang kemudian akan muncul domain tindakan atas respon yang disadari. Perilaku seseorang dibentuk oleh; a. Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan hasil dari tahu setelah seseorang melakukan penginderaan kepada suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2003). Selanjutnya Notoatmodjo (2010) menyatakan pengetahuan dibagi menjadi enam tingkat yaitu: tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*) dan evaluasi (*evaluation*); b. Sikap (*Attitude*) sebagai sekumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang, gagasan atau kelompok tertentu (Ahmadi, 2009). Tingkatan sikap menurut Notoatmodjo (2010) yaitu: menerima (*receiving*), merespon (*responding*), menghargai (*valuing*), dan bertanggungjawab (*responsible*); c. Tindakan (*Practice*) merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk nyata atau terbuka yang menurut Notoatmodjo (2010) dengan



tingkatan sebagai berikut: persepsi (*perception*), respons terpimpin (*guided response*), mekanisme (*mechanism*) dan adaptasi (*adaptation*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan untuk mengkaji pemahaman masyarakat yang mempengaruhi peran sertanya dalam program Kampung KB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan instrument panduan wawancara dan *focus discussion group* (FGD) bersama *stakeholder* lokal yang terdiri dari unsur 3T (pemerintah kampung, adat dan agama) dan 2P (perempuan dan pemuda)

## **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKULITAS**

### **a. Tahap Pengambilan Keputusan**

Masyarakat dan secara khusus PUS ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait program yang ada dan akan dilakukan di Kampung KB. Respon awal yang baik untuk membuat keputusan keterlibatan melalui pertemuan dan diskusi dengan menyumbangkan pemikiran dan ide-ide merupakan sinyal positif terhadap penerimaan konsep program. Fakta ini menunjukkan PUS bertindak tidak hanya sebagai obyek dari program tetapi juga ikut berperan memberikan usulan program yang akan dilakukan, sehingga bisa memenuhi harapan manfaat kegiatan di Kampung KB membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya seperti melengkapi berbagai dokumen kependudukan, mengerakkan kegiatan ketahanan keluarga, memotivasi calon akseptor dan pengembangan ekonomi melalui UPPKS.

Demikian keputusan-keputusan yang diambil PUS dalam peran sertanya pada program kampung KB sebagai keputusan terprogram maupun tidak terprogram, namun sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Herbert (2004) yang mengelompokkan pengambilan keputusan menjadi keputusan terprogram yang bersifat rutin dan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang baru dan keputusan tak terprogram sebagai keputusan yang bersifat baru karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Berangkat dari pengalaman tindakan praktik baik para suami-istri PUS yang selama ini terlibat aktif sebagai akseptor KB menjadi modal mendukung penerimaan konsep program Kampung KB yang lebih komprehensif. Masyarakat turut serta berpartisipasi dalam implemetasi rencana kegiatan yang sudah disepakati nampak dari tindakan kader yang aktif mengajak suami-istri yang belum berKB untuk menjadi akseptor KB, Bina Keluarga Balita melalui penguatan Posyandu dan Bina Keluarga Remaja yang terintegrasi melalui kegiatan keagamaan di gereja.

Nampak bahwa walaupun ada pro dan kontra namun partisipasi masyarakat cukup baik terlibat dalam pelaksanaan program kampung KB, sehingga ke depan perlu pendampingan yang intens untuk menjamin keberlanjutannya menuju kemandirian yang diharapkan. Dukungan ini penting, sebagaimana pernyataan Mardiyono (2017) bahwa perubahan terhadap peserta KB baru terutama KB MKJP maupun program terkait lainnya yang sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat sendiri dari berbagai tingkatan dan perlu KIE sebagai target akhir yaitu gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan agar Kampung KB dianggap prakarsa publik bukan semata program pemerintah.

### **c. Tahap Menerima Manfaat**

Walaupun masih ada pertentangan pandangan terhadap konsep KB, tetapi sejak adanya program kampung KB masyarakat menilai manfaat layanan KB yang terintegrasi dengan kegiatan sektor lain mulai nampak dengan terjadinya peningkatan akseptor KB baru setiap tahun. Misalnya kegiatan UPPKS walaupun belum optimal, telah memberikan manfaat peningkatan pendapatan keluarga untuk memenuhi



kebutuhan dasar. Fakta praktik baik ini menarik minat dan memotivasi masyarakat untuk terus berperan serta dalam program kampung KB.

Untuk itu ketika masyarakat mulai menikmati hasil peran sertanya dalam kampung KB sebagai modal positif untuk keberlanjutan program, karena program kampung KB bukan saja untuk membatasi jumlah anak tetapi juga memberikan dukungan peningkatan layanan pembangunan sektor lainnya demi meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat kampung. Hal ini sesuai dengan pernyataan BKKBN (2016) bahwa keberadaan Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KAMPUNG KB**

### **a. Faktor Pengetahuan (knowledge)**

Pemahaman yang baik dan benar dari masyarakat yang terbangun berdasarkan kultur, ideologi dan pengalamannya terhadap KB yang sekarang dilakukan terintegrasi melalui Kampung KB secara lintas sektor sangat mempengaruhi peran sertanya mendukung dan menjalankan kegiatan program Kampung KB. Modal ini sebagai jembatan dan pintu masuk menggerakkan partisipasi walaupun masih diwarnai pandangan para stakeholder lokal (unsur 3-tungku: pemerintah lokal, tokoh adat dan agama) yang masih pro-kontra terhadap KB.

Fakta penting karena Kampung KB tidak hanya sekedar melaksanakan program rutinitas melainkan juga substansinya manfaatnya bagi akselerasi peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejalan dengan filosofi masyarakat Papua bahwa “ibu sebagai penjaga keturunan suku” dan “anak sebagai penjaga martabat suku di masa depan” sehingga pendekatan Kampung KB perlu dilakukan sesuai situasi lokal secara kontekstual dan bukan saja mengejar target capaian kuantitas.

Berdasarkan fakta ini kehadiran Kampung KB bagi akseptor KB dipahami sebagai langkah positif pemerintah bagi peningkatan kualitas layanan, apalagi sejak awal masyarakat terutama PUS peserta KB aktif dilibatkan sebagai penggerak. Untuk itu kehadiran program kampung KB dianggap sebagai langkah strategis mendukung perwujudan keluarga dan masyarakat kampung berkualitas.

Wulandari (2008), Saiffiudin (2016) dan Wiwiek (2020) menyatakan bahwa apabila masyarakat memiliki pemahaman dan persepsi yang positif sangat menentukan keterlibatan mereka untuk turut serta secara aktif dalam pelaksanaan program KB. Namun sebaliknya bila pandangan negatif tidak difasilitasi akan memberikan dampak tidak optimalnya pencapaian tujuan program sebagaimana dikemukakan Ani dkk. (2019) bahwa rendahnya tingkat pemahaman akan sangat mempengaruhi pandangan negatif suami-istri PUS yang menganggap program KB hanya membatasi jumlah anak dan tidak memiliki dampak positif lainnya.

### **b. Faktor Sikap (attitude)**

Pemahaman masyarakat tentang KB tidak hanya dilihat sebagai proses menerima rangsangan informasi dari luar, tetapi juga sebagai sikap batin sebagai wujud interaksi dengan lingkungannya dalam ruang sosial-budaya setempat yang memungkinkan mereka untuk melihat secara mendalam urgensi pelaksanaan program KB yang lebih bermakna sebagai program pemerintah bagi pembangunan keluarga. Hal ini menjadi penting karena program KB yang bertujuan mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengatur usia perkawinan, jarak kelahiran dan mengatur jumlah anak ideal dalam keluarga menggunakan kontrasepsi yang mengarah kepada PUS.

Para stakeholder lokal masih sering memahami KB sebagai program pemerintah untuk mengatasi pertambahan penduduk mengacu pada tagline program KB “2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja”



telah membentuk perspektif masyarakat lokal bahwa program KB akan dan telah membatasi jumlah OAP yang sudah sedikit, sehingga kehadiran Kampung KB belum mengeser berbagai sikap kontra terhadap KB sebagai cermin situasional lokal Papua yang membatasi jumlah anak dengan anggapan tanah masih luas dan harus ditempati OAP itu sendiri.

Fakta nampak dalam keputusan ber-KB saat ini, dimana masyarakat masih menerapkan dua (2) pilihan penggunaan cara KB modern menggunakan kontrasepsi KB maupun secara tradisional dengan menggunakan cara-cara alamiah sesuai dengan kebiasaan dan keyakinan penggunanya, karena sangat terkait dengan latar belakang sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang menilai penggunaan kontrasepsi sebagai benda asing yang dibawa dari luar dan dimasukkan ke tubuh.

Untuk itu sikap pro dan kontra terhadap program Kampung KB perlu difasilitasi sesuai struktur sosial masyarakat dan bukan membentuk kelompok baru yang ternyata perannya tumpang tindih. Selain itu strategi penjangkauan yang selama ini hanya terpusat pada PLKB, perlu disesuaikan dengan situasi lokal yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dan berperan serta sehingga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program Kampung KB.

Hal ini penting untuk disikapi, sebagaimana pernyataan Pasrah (2014) bahwa rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait pelaksanaan program kampung KB menyebabkan pengelolaan program tidak optimal, sehingga kurangnya dukungan dalam penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat yang menyebabkan kegiatan di kampung KB kurang kondusif dan efektif.

#### c. Faktor Lingkungan sosial-budaya-ekonomi

Dalam upaya melakukan perubahan bagi masyarakat melalui sebuah program inovasi, termasuk Kampung KB tidak terlepas dari berbagai hambatan budaya terkait sistim nilai, perilaku, sikap dan kepercayaan; hambatan sosial terkait hubungan antar individu dan inovasi tersebut bertentangan dengan pranata sosial yang ada; serta hambatan psikologis terkait dengan cara penyampaian pesan inovasi.

Fakta ikatan emosional masyarakat yang kuat dengan kebiasaan dan nilai kearifan lokal dalam menggunakan cara KB tradisional atau KB alam yang masih dipraktikkan, menjadi faktor penghambat pencapaian target layanan KB maupun penerimaan konsep Kampung KB. Hal ini mempengaruhi efektivitas program terhadap rasio pemakai kontrasepsi aktif terhadap jumlah PUS atau indikator lainnya, misalnya capaian program penguatan ekonomi keluarga karena penerima modal UPPKS harus akseptor yang gunakan kontrasepsi.

Hambatan sosial lainnya karena pihak suami memihak calon istri dengan membayar mas kawin, sehingga istri harus melahirkan anak banyak bagi suami dan keluarganya untuk menjaga keturunan nama marga, perwaris hak ulayat, wibawa dan harga diri suami apalagi bila suami merupakan tokoh atau kepala suku. Hal ini menyebabkan para suami memiliki hak untuk melarang istri tidak ber-KB, termasuk peran serta dalam program Kampung KB karena khawatir akan terpengaruh sehingga ber-KB dan menggunakan kontrasepsi.

Persepsi masyarakat sebagaimana terungkap di atas tentang program KB yang dikaitkan dengan situasi sosial-budaya-ekonomi dalam kehidupan masyarakat Distrik Muara Tami secara tidak langsung mempengaruhi peran sertanya dalam kegiatan program Kampung KB.

Untuk itu hal penting yang dilakukan agar dapat meminimalkan berbagai faktor penghambat dengan membangun respon positif masyarakat melalui pendekatan Kampung KB yang memberdayakan masyarakat sesuai struktur sosial lokal melalui pendampingan yang intens. Hal ini penting sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto (2015) bahwa upaya ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap tujuan program, harus dapat menggerakkan berbagai unsur dalam masyarakat untuk mau terlibat dan aktif dalam kegiatan melalui tindakan nyata.



## KESIMPULAN

Peran serta masyarakat yang terlibat dalam program Kampung KB sebagai upaya inovasi sosial dalam mengelaborasi kembali program KB nampak dalam tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil. Namun dalam tahapan evaluasi belum dilakukan karena berbagai hambatan pada pengelola program Kampung KB.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta PUS dalam program Kampung KB terutama faktor pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan lingkungan sosial-budaya yang terbangun berdasarkan kultur, ideologi dan pengalamannya selama ini terhadap program dan layanan KB yang sudah dilakukan. Untuk meminimalkan resistensi pemahaman PUS yang tidak mendukung Kampung KB, maka program harus mengedepankan kualitas proses dari pada hanya sekedar input-output menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kontekstual dengan tidak membuat kelompok baru lagi dalam masyarakat kampung sebagaimana filosofi lokal makan pinang yang berarti harus menyatu.

Saran dari hasil penelitian ini yaitu perlu meningkatkan kualitas proses implementasi program dari pihak sehingga memberikan jaminan kepercayaan semua pihak secara berkelanjutan secara lebih terpadu dengan pendekatan berbasis kontekstual, melakukan pendampingan yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial dalam masyarakat (unsur 3-tungku dan unsur 2-peran) serta membangun sinergisitas lintas sektor dengan pendekatan kewilayahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journal articles:

- Afiyanti, Y., dan Pratiwi. (2016). *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ahmadi, Abu. (2009). *Psikologi Sosial*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggraeni, N, dan Afifuddin, Suyeno. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 14, No.1, Tahun 2020, hal. 32-41.
- Ani, Pandi, Suharty Roslan dan Sarpin. (2019). Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Keikutsertaan Dalam Program Keluarga Berencana (Studi di Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari). *Neo Societal*; Vol. 4; No.1. Januari 2019. Hal. 599-606.
- BKKBN. (2016). *Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB)*. BKKBN Pusat, Jakarta.
- Katharina Riris. (2019). *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Penerbit: Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.



- Latu, Saparuddin. (2018). Budaya Suku Dani dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*. Vol. 1. 2018.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasdian, F., T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. (2010). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Rumbiak, Michael C. (1999). Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan di Papua. Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Sumule Agus. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Penerbit: Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Stanley (Ed.). (2006). *Memberdayakan Orang Papua*. Penerbit: Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Wulandari, Taat. (2008). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Penelitian di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul). *Dimensia*. Volume 2, No. 1, Maret 2008; Hal. 77-100.
- Widjojo Muridan dan Tebay Neles. (2014). *Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua*. Penerbit: Jaringan Damai Papua, Jayapura.
- Widodo, E. S., & Nugroho, K. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana: Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1), 65–74. <https://doi.org/10.20473/jpi.v7i1.31098>
- Wiwiek, Endang P., dan Sri Utami. (2020). Analisa Tingkat Partisipasi Peserta Keluarga Berencana di Kampung KB Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *Jurnal Keperawatan Dirgahayu*, vol. 2, no.1, Maret 2020.
- Yullyana, Dwi Sora. (2012). Distribusi Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur 15-49 Tahun di





Provinsi Papua Tahun 2012. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Verona, G., Prandelli, E., and Sawhney, M. (2006). Innovation and Virtual Environments: Towards Virtual Knowledge Brokers. *Organization Studies*. 27(6), 765-788.